

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah mengenai gambaran praktik-praktik tindak pidana korupsi dan film ini sebagai media kampanye anti korupsi dengan sumber data yang berasal dari film Indonesia, yaitu “Kita Versus Korupsi (KvsK)”. Penulis menggunakan Lingkaran Hermeneutik dalam melihat fokus masalah ini.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang menggambarkan bentuk dan pola praktik tindak pidana korupsi dan film sebagai media kampanye anti korupsinya dalam film tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Film Kita Versus Korupsi bersama empat film lain dalam judul ini mengkomunikasikan tentang adanya praktik-praktik tindak pidana korupsi yang kian parah di masyarakat mulai dari yang bawah sampai kalangan atas.
2. Potret tindak pidana korupsi yang menampilkan unsur-unsur, jenis dan sanksinya. Unsur yaitu bagaimana sebuah tindakan itu dapat disebut sebagai sebuah tindakan korupsi apabila didalamnya mendasari beberapa unsur.

Orang yang terlibat (jabatannya, posisinya, dll) bentuknya dan tujuannya. Jenisnya yaitu mengacu pada tujuh bentuk korupsi yang diatur oleh undang-undang yaitu: penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan, kerugian uang negara, dan gratifikasi. Kemudian sanksi, setiap jenis korupsi ada jenis sanksinya masing-masing yang berbeda.

Dari perbuatan melanggar hukum yaitu korupsi yang diambil dari film *Kita Versus Korupsi* yang menjadi objek penelitian ini memperlihatkan adanya pembiaran atau sikap acuh tak acuh yang akhirnya berubah menjadi tindak kejahatan yang dianggap kecil dan dimaklumkan. Tampak dari sudah semakin menjangkitnya penyakit korupsi ini yang menjangkiti semua kalangan tidak pandang usia, tua, muda, kaya, orang biasa, sampai pejabat negara.

3. Film *Kita Versus Korupsi* menampilkan sebanyak 12 adegan/*scene* yang menampilkan praktik-praktik korupsi yang didalamnya terdapat jenis, unsur dan sanksinya. Didapat dari empat film diantaranya film *Rumah Perkara* 2 adegan/*scene*, film *Aku Padamu* 4 adegan/*scene*, film *Selamat Siang, Risa!* 3 adegan/*scene*, film *Psst... Jangan Bilang Siapa-siapa* 3 adegan/*scene*.
4. Berdasarkan jenisnya film *Kita Versus Korupsi* ini termasuk dalam jenis kampanye *Ideologically Or Cause Oriented Campaigns* yaitu jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Champaigns* (Kotler):

5. Berdasarkan karakteristik kampanye yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign makers*) dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Yang menjadi penggagas adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembag-lembaga lain seperti *Transparency International Indonesia*, *Anti Corruption Information Centre (ACIC)*, dan Cangkir Kopi.
 - b. Perancang, dan penyampai dalam arti adalah orang-orang yang membuat film ini mulai dari produser, sutradara, pemain dan kru.
 - c. Penanggung jawabnya yaitu Dedie A Rachim, Ary Nugroho, Ilham B. Soenang.
6. Berdasarkan tujuannya ternyata terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai dalam kampanye lewat film *Kita Versus Korupsi* ini yaitu:
 1. Menginformasikan dan memberikan pendidikan kepada individu atau publik
 2. Melakukan perubahan terhadap perilaku dan sikap demi kesejahteraan hidup
 3. Mempersuasi orang-orang untuk mengerti, memahami, dan melakukan suatu tindakan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi dan potret kampanye anti korupsi dalam film *Kita Versus Korupsi* yang merupakan film Indonesia. Peneliti memiliki beberapa saran, antara lain:

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan apabila nantinya ada yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa lebih menyempurnakannya dengan lebih mendalam dalam menganalisis dan memahami praktik-praktik korupsi dan media film sebagai media kampanye efektif.
2. kepada masyarakat sebagai penonton atau audiens, sebaiknya tidak hanya menjadi seorang penonton yang pasif dan hanya mampu menerima apa yang diberikan oleh orang lain, namun masyarakat diharapkan juga mampu mengkritisi dan memilih film-film yang akan di tontonnya sesuai dengan segmentasi serta konten yang terkandung dalam film tersebut.
3. Untuk para sineas ataupun calon sineas dapat membuat atau memproduksi film-film yang berkualitas yang jalan ceritanya terdapat banyak unsur edukasi yang nantinya dapat memberikan banyak informasi yang kemudian akan memperkaya dan memperluas pengetahuan serta mencerdaskan siapapun yang menonton film tersebut.

4. Bagi para penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, hakim-hakim dan pemerintah selaku yang berwenang membuat aturan atau undang-undang agar masalah korupsi yang semakin tak terkendali di negara ini harus ditindak tegas para pelakunya, yaitu dengan memberikan hukuman yang mempunyai efek jera. Pemerintah harus berani membuat undang-undang baru yang mengatur tentang hukuman bagi para koruptor agar lebih berat.